

BAB IV

UPAYA PBB DALAM MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA PENDUDUK YAMAN TERGADAP KRISIS KEMANUSIAAN

Dalam konflik Yaman, kondisi kemanusiaan telah semakin memburuk dikarenakan lambatnya penanganan dan penyelesaian konflik. Oleh karenanya, PBB dengan segala kemampuannya berusaha membantu warga Yaman agar tidak mengalami ketidakadilan yang lebih parah lagi. Menanggapi hal ini, penulis akan menjelaskan bagaimana upaya PBB dalam menjalankan *Responsibility to React* dan memberikan bantuan kepada penduduk Yaman agar terlindungi dari krisis kemanusiaan.

Salah satu dari unsur konsep *Responsibility to Protect* yakni *Responsibility to React* menjadi alasan PBB dalam menyelesaikan konflik di Yaman. *Responsibility to React* merupakan tanggung jawab PBB untuk menindaklanjuti jika ada suatu permasalahan internasional. Dalam konflik yang terjadi di Yaman, PBB telah melakukan upaya-upaya untuk menjalankan tanggung jawabnya tersebut.

Kemudian PBB selaku organisasi yang menjaga perdamaian dunia juga memberikan *Humanitarian Assistance* kepada penduduk Yaman. *Humanitarian Assistance* ini merupakan bantuan yang diberikan PBB kepada penduduk Yaman berupa akses kesehatan, kebutuhan sehari-hari, bantuan dana, dan bantuan lainnya.

A. Pelaksanaan *Responsibility to React* oleh PBB

PBB melakukan salah satu tanggung jawabnya sebagai organisasi pemelihara perdamaian dunia di kawasan konflik Yaman dengan melaksanakan *Responsibility to React*. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang merespon ketika ada suatu permasalahan terjadi. Dalam melakukan tanggung jawab ini, PBB menggunakan cara-cara damai untuk mencapai kepentingannya. Cara damai yang dapat dilakukan PBB yakni membuat resolusi, membuat komite khusus,

mengutus perwakilan khusus, melakukan perundingan-perundingan dengan pihak yang terlibat, mengadakan konferensi internasional serta menjadi penengah saat pihak yang terlibat sedang melakukan negosiasi.

1. Membuat Resolusi-resolusi

a. Resolusi nomor 2201

PBB mengeluarkan resolusi 2201 pada tanggal 15 Februari 2015 yang berisi tentang kekecewaan PBB terhadap aksi kelompok Houthi yang mengganggu perdamaian Yaman (Report, UN Documents for Yemen: Security Council Resolutions, 2015). Kelompok Houthi telah berusaha untuk mengambil kekuasaan pemerintahan Yaman dan mengganti semua anggota parlemen. Ini adalah aksi yang sudah melebihi batas dan bisa dikategorikan sebagai aksi kudeta. Oleh karena itu PBB mengecam tindakan Houthi yang telah merusak perdamaian Yaman.

Dalam resolusi ini PBB melakukan beberapa tindakan yang ditujukan kepada Houthi agar dipatuhi. Hal-hal yang harus dilakukan Houthi yakni harus memiliki niat untuk bernegosiasi dengan PBB dan pemerintah Yaman, melepaskan kekuasaan pemerintah pusat serta pemerintah daerah, melepaskan Presiden Hadi dan jajarannya yang telah ditahan, serta menghentikan segala bentuk serangan yang dapat mengganggu perdamaian Yaman.

b. Resolusi nomor 2216

DK (Dewan Keamanan) PBB pada 14 April 2015 mengeluarkan Resolusi nomor 2216 tentang konflik di Yaman (Report, UN Documents for Yemen: Security Council Resolutions, 2015). Hasil pemungutan suara yang diikuti 15 negara anggota tetap dan anggota tidak tetap dari DK PBB adalah 14 negara setuju, 0 tidak setuju, dan satu negara abstain. Rusia merupakan satu-satunya negara yang menyatakan abstain, tentu sesuai dengan sikap negara itu tentang konflik di Yaman, sementara 14 lainnya setuju. DK PBB saat ini terdiri dari 5 Anggota Tetap, yakni AS, Tiongkok (China), Inggris ,

Perancis, dan Rusia, serta 10 Anggota Tidak Tetap : Afrika Selatan, Azerbaijan, Guatemala, India, Jerman, Kolombia, Maroko, Pakistan, Portugal dan Togo.

Resolusi meminta Houthi mengakhiri penggunaan kekerasan, menarik pasukan mereka dari semua bidang yang telah mereka sita, termasuk ibukota Shana'a, melepaskan semua senjata dan disita oleh pihak keamanan, termasuk sistem rudal, serta menghentikan semua tindakan eksklusif yang sebetulnya dalam kewenangan Pemerintah yang sah Yaman.

Resolusi juga menambahkan, semua pihak agar menahan diri dari setiap provokasi atau ancaman terhadap negara tetangga, termasuk penggunaan rudal-rudal permukaan serta penimbunan senjata di setiap wilayah yang berbatasan dari negara tetangga. Houthi diminta melepaskan Mayor Jenderal Mahmoud Al-Subaihi, Menteri Pertahanan Yaman, semua tahanan politik, dan semua orang dalam tahanan rumah atau ditahan sewenang-wenang, serta mengakhiri perekrutan dan penggunaan anak-anak dan membebaskan semua anak-anak dalam konflik Yaman.

Tuntunan lainnya dari resolusi, adalah menegaskan kembali dukungannya terhadap legitimasi Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi, dan menyeru kepada semua pihak dan negara-negara anggota untuk menahan diri dari mengambil tindakan apapun yang merusak persatuan, kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah Yaman, dan legitimasi Presiden Yaman. Penolakan sewenang-wenang terhadap akses kemanusiaan dan merampas harta benda warga sipil serta kelangsungan hidup mereka, termasuk dengan sengaja menghambat pasokan bantuan, merupakan suatu pelanggaran hukum kemanusiaan internasional,

PBB juga mendesak semua pihak di Yaman untuk merespon positif terhadap permintaan Presiden Yaman, menghadiri sebuah konferensi di Riyadh, di bawah naungan Dewan Kerjasama Teluk, untuk lebih mendukung transisi politik di Yaman, dan untuk melengkapi dan mendukung perundingan yang ditengahi PBB. Resolusi DK PBB 2216 merupakan tindak lanjut permintaan Presiden Yaman Abd-

Rabbu Mansour Hadi, yang ditujukan kepada DK PBB serta kepada Dewan Kerjasama untuk Liga Arab dan negara-negara Arab Teluk agar segera memberi bantuan dengan cara apapun termasuk agresi militer untuk melindungi Yaman dari serangan militer Houthi.

Pada pasal lain Resolusi DK PBB Nomor 2216 mencantumkan soal embargo senjata. Dewan memutuskan bahwa semua negara anggota harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pasokan senjata langsung atau tidak langsung, penjualan atau pengalihan, atau untuk kepentingan Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya al Hakim, dan Abd al-Khaliq al-Houthi.

c. Resolusi nomor 2402

PBB mengeluarkan resolusi 2402 pada tanggal 26 Februari 2018. Resolusi ini merupakan bentuk tindakan tegas dari PBB kepada Houthi yang melancarkan serangan-serangan militer kepada pemerintah Yaman (Report, UN Documents for Yemen: Security Council Resolutions, 2018). Serangan tersebut telah mengakibatkan banyak kerugian dan korban jiwa meliputi penduduk sipil dan anak-anak. Serangan Houthi juga mengakibatkan penyakit yang menyebabkan korban semakin bertambah.

Resolusi ini berisi tentang pembekuan aset, larangan perjalanan dan embargo senjata. Pembekuan aset kepada kelompok Houthi ini bermaksud agar mereka tidak bisa menjual asetnya untuk membeli alat militer. Sedangkan larangan perjalanan agar mempersempit peluang para penyusup yang ingin mengganggu perdamaian Yaman. Kemudian PBB memberlakukan embargo senjata kepada Houthi bertujuan untuk mengurangi kesempatan Houthi menyerang pemerintah Yaman.

d. Resolusi nomor 2451

Pada tanggal 21 Desember 2018, PBB menerbitkan resolusi kembali untuk meredakan situasi di Yaman yang semakin memburuk (Report, UN Documents for Yemen: Security Council Resolutions, 2018). Pihak Houthi telah

melanggar banyak kesepakatan yang disepakati. Houthi melakukan hal ini karena merasa pihaknya dirugikan atas kesepakatan-kesepakatan yang ada. Atas dasar tersebut, Houthi tetap secara berkala menyerang pasukan pemerintah Yaman dan koalisi internasional.

Resolusi ini mengingatkan kembali kepada pihak pemerintah Yaman dan kelompok Houthi untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati di Stockholm serta meluruskan kembali segala hambatan untuk implementasi perjanjiannya. Resolusi ini juga bermaksud untuk menahan pihak-pihak yang berkonflik melakukan agresi militer sehingga tidak terjadi pertumpahan darah.

Tabel 4.1 Periode Perilisan Resolusi PBB untuk Krisis Yaman

Waktu	Resolusi
15 Februari 2015	Resolusi Nomor 2201
14 April 2015	Resolusi Nomor 2216
26 Februari 2018	Resolusi Nomor 2402
21 Desember 2018	Resolusi Nomor 2451

Sumber : (OESGY, 2019)

2. Mengirim utusan khusus

a. Ismail Ould Sheikh Ahmed

Pada 25 April 2015, Sekretaris Jendral PBB Ban Ki Moon menunjuk Ismail Ahmed untuk menjadi atasan khusus PBB untuk menangani krisis Yaman. Tugas Ismail Ahmed yakni menjadi penengah antar kedua belah pihak, memberi saran-saran, dan mengadakan perundingan. Ismail Ahmed juga memberi laporan kepada kantor pusat PBB setiap 60 hari. Ismail Ahmed dapat menjadi perantara antara kedua belah pihak agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Pihak yang berkonflik dapat menyampaikan aspirasinya atau saran melalui Ismail Ahmed. (Nations, United Nations in Yemen, 2018)

Gambar 4.1 Ismail Ould Sheikh Ahmed



Sumber : (Besheer, 2015)

Dalam melaksanakan tugasnya Ismail Ahmed telah melaksanakan 2 kali perundingan dalam masa penugasannya. Perundingan ini mempertemukan pihak pemerintah Yaman dan kelompok Houthi. Ismail Ahmed menyelenggarakan perundingan tersebut di Swiss dan Kuwait. Kedua negara ini dipilih dengan alasan memiliki kenetralan yang adil untuk kedua belah pihak. Pada kesempatan ini, kedua belah pihak dapat bernegosiasi untuk kepentingan bersama.

Perundingan pertama dilaksanakan pada tanggal 15-21 Desember 2015 di Bern, Swiss. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah Yaman dan kelompok Houthi yang ditengahi oleh PBB. Pertemuan ini diagendakan karena gencatan senjata yang sebelumnya disepakati telah dilanggar. PBB berusaha menemukan titik temu antar kedua belah pihak dan mengakhiri perang serta gencatan senjata secara permanen.

Pada pertemuan ini, kedua belah pihak masih sulit untuk percaya satu sama lain. Hal ini dikarenakan kesepakatan-kesepakatan seperti melepaskan tahanan dan gencatan senjata sering dilanggar oleh keduanya. Kedua belah sama-sama tidak menghormati perjanjian yang sudah disetujui masing-masing. PBB selaku pihak penengah dalam pertemuan ini mencairkan

suasana dengan memberi beberapa proposal saran yang sama-sama tidak merugikan kepada kedua belah pihak.

Hasil dari pertemuan di Bern ini akhirnya kedua belah pihak telah menyetujui proposal dari PBB. Proposal tersebut yakni kedua belah pihak membubarkan semua blokade agar akses jalan kembali normal, membuka akses bantuan kemanusiaan, melakukan gencatan senjata, melepaskan para tahanan dan menarik semua pasukan militer mundur dari wilayah penduduk.

Menanggapi perjanjian yang disepakati dalam perundingan di Swiss, kedua belah pihak masih tetap melanggar isi dari perjanjian tersebut. Pihak yang berkonflik masih melakukan agresi militer kepada masing-masing pertahanan. Agresi ini kembali mengakibatkan kerugian yang besar, kerusakan bangunan serta korban jiwa. Merespon hal ini, Ismail Ahmed mengadakan pertemuan yang kedua antar kedua belah pihak.

Ismail Ahmed menyelenggarakan pertemuan kedua pada April 2016 di Kuwait (Ghobari, 2016). Pertemuan ini kembali mempertemukan kedua belah pihak dan ditengahi oleh PBB. Dalam pertemuan ini memiliki fokus untuk membuat pemerintahan yang lebih inklusif dan mengembalikan otoritas negara kepada negara, yang telah terbagi antara pemerintahan Yaman dan pemerintahan Houthi serta mengakhiri aksi saling serang.

Dalam pertemuan ini, kondisi antar kedua pihak masih sulit untuk mengarah pada titik damai. Hal ini dikarenakan masih terjadi serangan anatar keduanya di Yaman. Dalam 24 jam pertemuan, di sisi lain terdapat pertempuran di wilayah selatan Yaman yang menewaskan 42 orang, Kondisi ini semakin memperparah jalannya pertemuan yang sedang berlangsung. Saran maupun proposal belum disepakati dalam pertemuan ini. Pada akhirnya, pihak Houthi meninggalkan forum pertemuan karena merasa isi pertemuan sudah tidak menguntungkan bagi pihaknya. Pertemuan ini dianggap gagal karena tidak kesepakatan yang terjadi antar kedua belah pihak.

b. Martin Griffiths

Pada tanggal 16 Februari 2018, Sekretaris Jendral saat ini yakni Antonio Guterres menunjuk Martin Griffiths sebagai utusan khusus PBB untuk Yaman menggantikan Ismail Ahmed (UN, Martin Griffiths, 2018). Penggantian ini bertujuan untuk mengawali periode baru mendamaikan krisis Yaman. Antonio Guterres berharap Martin Griffiths dapat menjadi aktor penting agar terciptanya perdamaian kembali bagi penduduk Yaman.

Gambar 4.2 Martin Griffiths



Sumber : (UN, Safety of civilians in key Yemeni port, ‘intrinsically’ linked to restarting long-term peace negotiations: UN Special Envoy, 2018)

Dalam masa jabatannya sebagai utusan khusus, Martin Griffiths mengawali kinerjanya dengan mengadakan pertemuan yang berlokasi di Stockholm, Swedia. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 6-13 Desember 2018. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah Houthi dan kelompok Houthi. Pertemuan ini diselenggarakan atas dasar konflik yang tidak pernah usai dan menimbulkan masalah-masalah yang lebih kompleks pada negara dan penduduk Yaman.

Pada pertemuan ini kedua pihak memberikan usulan serta rekomendasi untuk kepentingan bersama. Kedua belah

pihak sama-sama memiliki niat yang lebih baik daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dalam pertemuan yang telah dilakukan beberapa kali, kedua belah pihak masih belum bisa diajak untuk kearah perdamaian. Pertemuan ini pun diakhiri dengan menyepakati Perjanjian Stockholm.

Perjanjian Stockholm ini bertujuan untuk mencegah situasi Yaman ke arah yang lebih buruk. Perjanjian ini menyepakati yakni, yang pertama, saling membebaskan para tahanan. Total tahanan yang ditahan oleh masing-masing pihak mencapai 15.000 orang. Tahanan ini merupakan para pejabat, kerabat maupun penduduk sipil. Kedua, pembukaan kembali bandara Sanaa. Bandara Sanaa merupakan bandara yang vital bagi Yaman. Bandara ini menjadi salah satu yang paling penting untuk fasilitas transportasi bagi penduduk Yaman. Ketiga, mengintegrasikan bank-bank sentral Yaman untuk membayar gaji pegawai negeri. Kelompok Houthi telah menguasai bank-bank yang memiliki peran penting dalam keseimbangan ekonomi Yaman. Sejak dikuasai oleh kelompok Houthi, bank-bank ini hanya mendukung aktivitas keuangan Houthi. Pengambil alihan bank yang dilakukan oleh Houthi ini juga bertujuan untuk mempersiapkan menguasai pemerintahan Yaman. Keempat, mengakhiri pertempuran di Hodeida dan Taiz dan Kelima, bersama-sama merancang konsensus rencana untuk berdamai. Pemerintah Yaman dan kelompok Houthi diharapkan memiliki niat yang baik untuk mencari solusi bersama demi berakhirnya konflik ini. (Salisbury, 2018)

Menanggapi perjanjian ini, PBB yang telah berusaha selama beberapa tahun untuk mencapai progres yang kecil dalam usahanya menengahi konflik. PBB akhirnya mendapatkan awal baru yang memiliki masa depan yang lebih baik walaupun masih sangat sulit untuk mencapai perdamaian di Yaman. Setelah perjanjian ini, PBB mencoba membujuk kelompok Houthi yang menguasai perdagangan di Laut Merah untuk menarik pasukan mereka. Jalur Laut Merah merupakan jalur yang sangat penting bagi Yaman dalam menjalankan perdagangan maupun pengiriman bantuan kemanusiaan ke Yaman.

2. Pemberian Humanitarian Assistance oleh PBB

PBB selaku badan internasional bertanggung jawab atas anggotanya yang membutuhkan bantuan. Bantuan ini bisa berbentuk melalui dana maupun fasilitas. Negara Yaman yang merupakan anggota dari PBB berhak untuk mendapatkan bantuan dari PBB. Kondisi kemanusiaan di Yaman sangat memprihatinkan. Terdapat lebih dari ribuan korban meninggal, jutaan orang terkena dampak konflik, serta penyakit yang bertambah.

Yaman menghadapi masalah yang banyak masalah terkait krisis kemanusiaan seperti, kelaparan, wabah penyakit, kekurangan air bersih, tempat tinggal dan akses kesehatan. Terdapat sekitar 75 persen atau 22,2 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk 11,3 juta orang yang membutuhkan bantuan akut. Keadaan ini membutuhkan sumber daya manusia yang banyak untuk membantu penduduk Yaman. Di sisi lain, akses bantuan juga dibatasi oleh ketidakamanan terkena serangan termasuk kesulitan membawa pekerja bantuan ke Yaman. Dari 333 wilayah terdapat 107 wilayah yang menderita kelaparan lebih parah dan wilayah-wilayah ini membutuhkan perhatian lebih agar mencegah korban bertambah.

Langkah PBB dalam membantu penduduk Yaman yakni dengan membuat program Yaman Humanitarian Response Plan (YHRP) (OCHA, Yemen: Humanitarian Response Plan January-December 2018, 2018). YHRP merupakan strategi PBB untuk mengurangi dan menyelesaikan krisis kemanusiaan di Yaman. YHRP memiliki tujuan objek utama, yakni :

1. memberi bantuan penyelamatan jiwa kepada orang-orang yang kritis melalui respon yang cepat dan efektif,
2. memastikan semua bentuk bantuan kemanusiaan diberikan secara adil kepada pria, wanita dan anak-anak,
3. mendukung dan memperbanyak layanan dan lembaga untuk turut aktif membantu bersama,
4. memberikan respon bantuan yang jelas, multi-sektoral, terkoordinasi dan inklusif yang bertanggung jawab.

Dalam mensukseskan YHRP, PBB mempunyai program membantu Yaman dengan membuat pertemuan antar negara-negara anggota yang mana diselenggarakan penggalangan dana. Dari tahun 2015 sampai 2018 PBB selalu mengadakan pertemuan antar negara anggota untuk mendonasikan sejumlah dana untuk bantuan kemanusiaan, yang disebut High-Level Pledging Event. Pada pertemuan ini, negara-negara anggota menyerahkan donasinya dan membahas strategi terbaru untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Yaman.

Dimulai pada tahun 2015, High Level Pledging Event diselenggarakan pada tanggal 9 November 2015 di New York. Pada pertemuan ini PBB membahas dua topik yakni donasi untuk aktivitas pembangunan dan penanganan masalah pangan dan pertanian. Dalam pertemuan ini, donasi yang terkumpul sebanyak 57,2 Juta US Dollar. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan ini dikarenakan masalah ekonomi di negara masing-masing yang menghambat jumlah donasi. Pada tahun berikutnya yakni, 7 November 2016, PBB menggelar lagi pertemuan ini di New York. Topik pembahasan yang dibahas masih sama dengan tahun sebelumnya. Dana yang terkumpul meningkat hampir 50 persen dari tahun 2015, yakni 107,2 Juta US Dollar. Pada tahun 2017, PBB menyelenggarakan High Level Pledging Event pada tanggal 6 November 2017 di Geneva, Swiss. Pertemuan ini dihadiri oleh 73 negara anggota PBB. Pada pertemuan ini, dana yang terkumpul sebanyak 175,6 Juta US Dollar. Pada tahun 2018, PBB kembali menggelar pertemuan pengumpulan donasi ini pada 7 Desember 2018. Jumlah donasi yang dapat dikumpulkan sejumlah 208,7 Juta US Dollar. (OCHA, 2018)

Tabel 4.2 Total Hasil Bantuan per Tahun Untuk Yaman

Tahun	Total Jumlah Bantuan
2015	57,2 Juta US Dollar
2016	107,2 Juta US Dollar
2017	175,6 Juta US Dollar
2018	208,7 Juta US Dollar

Sumber : (OCHA, Yemen Funding, 2019)

Melihat data diatas, PBB selaku organisasi internasional telah memberikan kontribusi yang signifikan dari tahun ke tahun. PBB selalu mempromosikan penanganan isu kemanusiaan serta perdamaian bersama setiap tahun melalui pertemuan ini. Dari jumlah donasi diatas, PBB telah sukses menggerakkan negara-negara anggota untuk menangani krisis kemanusiaan di Yaman dengan serius. Beberapa negara dengan penghasilan negara yang banyak seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Jerman dan negara maju lainnya setiap tahun selalu aktif membantu menuntaskan krisis ini. Data di bawah ini merupakan daftar negara dengan jumlah total donasi terbanyak.

Tabel 4.3 Negara Penyumbang Donasi Terbanyak

Negara	Jumlah Total Donasi dalam US Dollar	Jumlah dalam Persen
Amerika Serikat	288,68	21,8
Uni Emirat Arab	185	14
Komisi Eropa	157	11,9
Jerman	98,57	7,5
Britania Raya	88,20	6,7
Arab Saudi	87,95	6,7
Jepang	39,92	3
Kanada	32,33	2,4
CERF	31,66	2,4
Swedia	26,88	2

Sumber : (UNOCHA, 2019)

Alokasi dana bantuan PBB diatur dengan inklusif, efisien dan transparan. Dana bantuan dialokasikan pada kebutuhan yang paling kritis secara tepat waktu. Prioritas dana dialokasikan pada sektor makanan, nutrisi, kesehatan dan air bersih. Donasi ini juga dialokasikan untuk dana cadangan. Dana cadangan dialokasikan pada keadaan yang tak terduga, darurat dan kebutuhan strategis secara cepat dan fleksibel. Proses alokasi dana cadangan bersifat lebih cepat untuk

memungkinkan respon yang tanggap terhadap keadaan darurat. Dana darurat dapat dialokasikan untuk memperbaiki, mengurangi dan mencegah timbulnya korban jiwa, kerusakan fisik dan psikologi atau ancaman yang dapat merusak perdamaian penduduk Yaman. Kemudian, dana cadangan juga dapat dipakai ketika ada serangan secara tiba-tiba, yang mana diperuntukkan untuk layanan kemanusiaan. Di bawah ini merupakan tabel yang menunjukkan alokasi dana ke beberapa sektor untuk membantu dan mengurangi krisis kemanusiaan penduduk Yaman.

Tabel 4.3 Alokasi Donasi

Bidang	Jumlah yang harus dipenuhi (juta US Dollar)	Jumlah yang terpenuhi (juta US Dollar)	Presentase terpenuhi
Telekomunikasi Darurat	5,5	2,8	50,2
Koordinasi dan Keamanan	26,2	7,7	29,4
Proses Mekanisme	48,6	17	34,9
Logistik	68,5	44,3	64,7
Pendidikan	105,4	74,2	70,4
Pengungsi	121,6	10,6	8,7
Perlindungan	153,0	53,5	35
Tempat tinggal	221,8	13,5	6,1
Air bersih	285,5	87,8	30,8
Nutrisi	320,3	45,5	14,2
Kesehatan	627,2	121,7	19,4
Keamanan Makanan dan Pertanian	2209	592,6	26,8

Dana tak tertuga		218,2	
Bidang-bidang lain		32,8	

Sumber : (UNOCHA, 2019)